



Peran Ojk Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi: Evaluasi Penyelesaian 127 Berkas Perkara Tindak Pidana Perbankan Dan Pasar Modal

The Role of OJK in Enforcing Economic Crimes: Evaluation of the Settlement of 127 Banking and Capital Market Criminal Case Files

Willy Yohanes Tolan¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: willyyohanes118@gmail.com, hoedyjoesoef@gmail.com

Article history :

Abstract

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted: 13-01-2025

Published: 15-01-2025

This study aims to evaluate the role of the Financial Services Authority (OJK) in law enforcement against economic crimes, especially in resolving 127 case files involving the banking and capital market sectors. In the era of globalization marked by technological advances, the economic sector faces new challenges in the form of increasing cases of economic crimes, such as fraud and money laundering. OJK as a supervisory and law enforcement agency has significant responsibilities in handling these violations. This study uses normative legal methods with an analysis of applicable regulations and law enforcement practices by OJK. The results of the study indicate that although OJK has handled a number of case files, there are obstacles in terms of human resources, budget, and case complexity that affect the effectiveness of law enforcement. Therefore, recommendations are needed to improve OJK's performance in law enforcement, including strengthening cooperation with other institutions and increasing public participation.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), Economic Crimes, Law Enforcement, Banking and Capital Market Sectors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya dalam penyelesaian 127 berkas perkara yang melibatkan sektor perbankan dan pasar modal. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, sektor ekonomi menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kasus tindak pidana ekonomi, seperti penipuan dan pencucian uang. OJK sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menangani pelanggaran ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku dan praktik penegakan hukum oleh OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah menangani sejumlah berkas perkara, terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan kompleksitas kasus yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja OJK dalam penegakan hukum, termasuk penguatan kerjasama dengan lembaga lain dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: **Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tindak Pidana Ekonomi, Penegakan Hukum, Sektor Perbankan dan Pasar Modal**

DAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, sektor ekonomi, khususnya perbankan dan pasar modal, mengalami transformasi yang sangat signifikan.



Perkembangan ini membawa dampak positif, seperti peningkatan akses terhadap layanan keuangan dan investasi, namun juga memunculkan berbagai tantangan baru. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya kasus tindak pidana ekonomi, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Tindak pidana ekonomi ini tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana ekonomi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, serta untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan dan pasar modal. Dalam menjalankan tugasnya, OJK diharapkan dapat melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran yang terjadi, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja OJK dalam menangani berkas perkara tindak pidana ekonomi menjadi sangat relevan untuk memahami efektivitas dan efisiensi lembaga ini dalam menjalankan tugasnya, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah penyelesaian berkas perkara. Dalam periode tertentu, OJK telah menangani sejumlah berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal. Namun, pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif OJK dalam menyelesaikan berkas-berkas tersebut. Evaluasi terhadap 127 berkas perkara yang ditangani oleh OJK menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di sektor ini. Proses penyelesaian berkas perkara yang lambat atau tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap OJK dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian berkas perkara dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut (Asasmita, 1997).

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, serta kompleksitas kasus yang ditangani. Selain itu, adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu juga dapat mempengaruhi independensi OJK dalam menjalankan tugasnya. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ekonomi memiliki jaringan yang kuat dan sumber daya yang cukup untuk menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian berkas perkara dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja lembaga ini.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak pidana ekonomi dan berpartisipasi dalam proses hukum dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. OJK perlu melakukan



sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi lembaga ini dalam menangani tindak pidana ekonomi, sehingga masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari tindak pidana ekonomi dan pentingnya peran mereka dalam melaporkan pelanggaran.

Selain itu, kerjasama antara OJK dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sinergi antar lembaga ini dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan, serta mempermudah dalam pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menindak pelanggaran. Kerjasama yang baik antara OJK dan lembaga penegak hukum lainnya juga dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kerjasama ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi antar lembaga dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam kerjasama tersebut (Djamali, 2009).

Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya sekadar menindak pelanggaran, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, OJK perlu menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Evaluasi terhadap sanksi yang diberikan dalam penyelesaian berkas perkara juga menjadi penting untuk mengetahui apakah sanksi tersebut sudah efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Sanksi yang tidak tegas atau tidak konsisten dapat mengurangi efek jera dan mendorong pelaku untuk terus melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan sanksi yang diterapkan oleh OJK dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran OJK dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi, khususnya dalam penyelesaian 127 berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja OJK dalam penegakan hukum, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi OJK dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor ekonomi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas OJK dalam menyelesaikan berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal, khususnya dalam konteks 127 berkas perkara yang telah ditangani?
2. Apa saja kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan dan pasar modal?
3. Bagaimana peran masyarakat dan kerjasama antar lembaga dalam mendukung penegakan hukum oleh OJK terhadap tindak pidana ekonomi?



Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengevaluasi kinerja OJK dalam penyelesaian berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Untuk menganalisis peran masyarakat dan kerjasama antar lembaga dalam mendukung penegakan hukum oleh OJK.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya dalam penyelesaian 127 berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal. Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan OJK, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh OJK. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum di sektor perbankan dan pasar modal, serta bagaimana OJK menerapkan norma-norma tersebut dalam praktik.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kendala-kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Selain itu, analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, seperti laporan tahunan OJK dan statistik terkait tindak pidana ekonomi, akan dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum oleh OJK. Analisis data akan dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan untuk menghasilkan temuan yang mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas OJK dalam menyelesaikan berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal, khususnya dalam konteks 127 berkas perkara yang telah ditangani

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam penegakan hukum di sektor perbankan dan pasar modal, terutama dalam menangani tindak pidana ekonomi. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap efektivitas OJK dalam menyelesaikan berkas perkara menjadi sangat penting. Berdasarkan data yang tersedia, OJK telah menangani sejumlah 127 berkas perkara yang mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.



Jumlah berkas perkara ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi OJK dalam menjalankan tugasnya. Setiap kasus yang ditangani tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku, tetapi juga keterampilan analitis untuk mengidentifikasi pola dan praktik yang merugikan. Oleh karena itu, analisis terhadap data penyelesaian berkas perkara ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja OJK dalam menegakkan hukum di sektor ini, serta membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus di masa depan (Priyana, 2021).

Dalam analisis data penyelesaian berkas perkara, penting untuk merinci jenis-jenis tindak pidana yang ditangani oleh OJK. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda, yang dapat mempengaruhi waktu dan metode penyelesaian. Misalnya, kasus penipuan yang melibatkan teknologi informasi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kasus penggelapan yang lebih tradisional. Selain itu, waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap jenis perkara juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas OJK. Dengan memahami waktu penyelesaian ini, kita dapat mengevaluasi seberapa cepat OJK dapat merespons dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Data ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja OJK dengan lembaga pengawas keuangan lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga OJK dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan oleh lembaga lain.

Kriteria keberhasilan dalam penyelesaian berkas perkara juga perlu ditetapkan untuk menilai efektivitas OJK. Indikator keberhasilan dapat mencakup jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, serta dampak dari penyelesaian perkara terhadap pelaku dan masyarakat. Selain itu, perbandingan dengan standar internasional atau lembaga lain yang memiliki fungsi serupa dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kinerja OJK. Dengan membandingkan hasil yang dicapai OJK dengan lembaga pengawas keuangan di negara lain, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa OJK tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga dapat bersaing di tingkat internasional dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen.

Dampak penyelesaian berkas perkara terhadap kepercayaan publik juga merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Kepercayaan masyarakat terhadap OJK dapat dipengaruhi oleh seberapa transparan dan akuntabel OJK dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi. Jika masyarakat melihat bahwa OJK mampu menyelesaikan perkara dengan baik dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, maka kepercayaan terhadap lembaga ini akan meningkat. Sebaliknya, jika penyelesaian perkara dianggap lambat atau tidak memuaskan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap OJK dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk tidak hanya fokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga untuk mengkomunikasikan hasil dan prosesnya kepada publik dengan cara yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang diambil oleh OJK dalam menegakkan hukum (Murdadi, 2012).

Hubungan antara penyelesaian perkara dan stabilitas sektor keuangan juga perlu diperhatikan. Penyelesaian berkas perkara yang efektif dapat berkontribusi pada stabilitas sektor keuangan dengan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana ekonomi. Ketika pelaku



kejahatan merasa bahwa mereka akan ditindak tegas oleh OJK, mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sistem keuangan, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas sektor keuangan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap keamanan dan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, OJK perlu memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam konteks ini, OJK perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan berkas perkara tindak pidana ekonomi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di OJK, sehingga pegawai memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian perkara, sehingga masyarakat dapat melihat dan memahami langkah-langkah yang diambil oleh lembaga ini dalam menegakkan hukum. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai OJK, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan terbaru mengenai praktik terbaik dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, efektivitas OJK dalam menyelesaikan berkas perkara tindak pidana perbankan dan pasar modal sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk analisis data penyelesaian, kriteria keberhasilan, dan dampak terhadap kepercayaan publik. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap aspek-aspek ini, diharapkan OJK dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk OJK dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor ekonomi. Dengan demikian, OJK tidak hanya akan mampu menyelesaikan perkara dengan lebih baik, tetapi juga akan mampu membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat terhadap lembaga ini dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan dan pasar modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum di sektor perbankan dan pasar modal di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan sumber daya manusia dan kompetensi pegawai OJK. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di OJK sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Meskipun OJK memiliki pegawai yang terlatih, jumlahnya masih terbatas dan tidak sebanding dengan kompleksitas kasus yang harus ditangani. Selain itu, tidak semua pegawai memiliki latar belakang yang memadai dalam bidang hukum dan keuangan, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi sering kali memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku serta kemampuan analitis yang tinggi untuk mengidentifikasi pola dan praktik yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk melakukan evaluasi terhadap kualifikasi pegawai dan memastikan bahwa mereka memiliki



kompetensi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Nasution, 2014).

Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai OJK juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. OJK perlu mengimplementasikan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menangani tindak pidana ekonomi. Program pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang regulasi yang berlaku, teknik investigasi, hingga keterampilan analisis data. Dengan meningkatkan kapasitas pegawai, OJK diharapkan dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang muncul. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dan institusi pendidikan juga dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kompetensi pegawai OJK, sehingga mereka dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain. Pengembangan kapasitas ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu pegawai, tetapi juga akan memperkuat institusi OJK secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Kendala lain yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Analisis anggaran OJK menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan, namun alokasi anggaran untuk penegakan hukum sering kali tidak memadai. Keterbatasan anggaran ini dapat berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum, karena OJK mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan yang mendalam atau untuk mengadopsi teknologi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi kemampuan OJK untuk merekrut dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas lembaga dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi. Dalam konteks ini, penting bagi OJK untuk mengajukan anggaran yang lebih memadai kepada pemerintah, serta mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung kegiatan penegakan hukum.

Kompleksitas kasus yang ditangani OJK juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum. Tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan berbagai pihak dan transaksi yang rumit, sehingga memerlukan pendekatan yang cermat dan analitis. OJK harus mampu mengidentifikasi pola-pola kejahatan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, serta mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung tindakan hukum. Selain itu, intervensi dari pihak ketiga, seperti pengaruh politik atau tekanan dari kelompok tertentu, dapat mempengaruhi independensi OJK dalam menjalankan tugasnya. Intervensi ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, serta menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk menjaga integritas dan independensinya agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum dengan baik, serta menghindari pengaruh eksternal yang dapat merusak kredibilitas lembaga.

Aspek hukum dan regulasi juga menjadi kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. Tinjauan terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur sektor perbankan dan pasar modal, masih ada kebutuhan untuk revisi dan pembaruan. Beberapa regulasi mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman atau tidak cukup kuat untuk menanggulangi praktik-praktik kejahatan yang



semakin kompleks. Hambatan hukum yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, seperti ketidakjelasan dalam peraturan atau tumpang tindihnya regulasi, dapat menghambat OJK dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi di sektor ekonomi. Hal ini juga mencakup perlunya kolaborasi dengan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat mendukung penegakan hukum yang efektif.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, OJK perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan audit internal untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas proses penegakan hukum yang ada. Dengan melakukan evaluasi ini, OJK dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala yang ada. Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum. Kerjasama ini dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan membangun jaringan kerjasama yang solid, OJK dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai lembaga untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan dan pasar modal sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala ini, OJK diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan sektor keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk OJK dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor ekonomi, sehingga OJK dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dengan demikian, OJK tidak hanya akan mampu menyelesaikan perkara dengan lebih baik, tetapi juga akan mampu membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat terhadap lembaga ini dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Peran masyarakat dan kerjasama antar lembaga dalam mendukung penegakan hukum oleh OJK terhadap tindak pidana ekonomi

Peran masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi sangat penting, terutama dalam konteks Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi sektor perbankan dan pasar modal. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana ekonomi menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu tindak pidana ekonomi, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari, akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan. Oleh karena itu, OJK perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui media sosial, seminar, dan program-program komunitas (Pikahulan (Pikahulan, 2020)).

Upaya OJK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga harus mencakup penyediaan saluran yang mudah diakses untuk melaporkan tindak pidana ekonomi. Masyarakat perlu merasa



bahwa suara mereka didengar dan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius. OJK dapat mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan secara anonim dan aman. Selain itu, OJK juga dapat melibatkan masyarakat dalam program-program pengawasan, di mana mereka dapat berperan sebagai pengawas independen dalam kegiatan ekonomi di lingkungan mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas OJK dalam menangani tindak pidana ekonomi.

Kerjasama antara OJK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. Bentuk kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi dalam penyelidikan kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana ekonomi. Dengan adanya kerjasama yang baik, OJK dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari lembaga lain untuk memperkuat proses penegakan hukum. Misalnya, kepolisian dapat memberikan dukungan dalam hal penyelidikan lapangan, sementara kejaksaan dapat membantu dalam proses penuntutan. Analisis efektivitas kerjasama ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis dan efisien dalam menangani kasus-kasus yang ada.

Inisiatif OJK dalam melakukan edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum. Program-program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak tindak pidana ekonomi dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar. OJK dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana ekonomi, serta cara-cara untuk melindungi diri dari praktik-praktik tersebut. Dampak dari program sosialisasi ini dapat terlihat dalam peningkatan jumlah laporan yang diterima OJK terkait tindak pidana ekonomi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan demikian, edukasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum (Sinaga et al, 2022).

Rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antara OJK dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. Salah satu rekomendasi adalah untuk membentuk forum kerjasama yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk OJK, kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan masyarakat. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penegakan hukum. Selain itu, OJK juga perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan umpan balik dari masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, OJK dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi di lapangan dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya.

Strategi untuk melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum juga harus mencakup pengembangan program-program yang mendorong partisipasi aktif. OJK dapat mengadakan kompetisi atau penghargaan bagi individu atau kelompok yang berhasil melaporkan tindak pidana ekonomi atau yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, OJK juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengawasan kegiatan ekonomi di



lingkungan mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dan kerjasama antar lembaga dalam mendukung penegakan hukum oleh OJK terhadap tindak pidana ekonomi sangatlah penting. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan melaksanakan program edukasi yang efektif, OJK dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk OJK dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor ekonomi, sehingga OJK dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dengan demikian, kolaborasi yang baik antara OJK, lembaga penegak hukum, dan masyarakat akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam mengurangi tindak pidana ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa OJK memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, namun masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, disarankan agar OJK meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum. Selain itu, OJK perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian perkara. Masyarakat juga harus dilibatkan lebih aktif dalam penegakan hukum, melalui program edukasi dan saluran pelaporan yang mudah diakses. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan OJK dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- B. Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2012).
- B. Nasution, "Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 281–294.
- D. N. N. S. Sinaga et al., "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 136–142.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Rustam Magun Pikhulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.



T. F. Jamal and P. Priyana, “Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 260–267.